

**POLA RELASI MEDIA, NEGARA, DAN MASYARAKAT:  
TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS SEBAGAI ALTERNATIF**

Abdul Firman Ashaf  
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung  
Email: *ashafnov2004@yahoo.com*

**ABSTRAK.** Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan relasi media, negara, dan masyarakat dalam pandangan teori strukturasi Anthony Giddens. Data dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan. Teori strukturasi menunjukkan bahwa relasi media, negara dan masyarakat adalah sebuah praktik sosial, bukan dikuasai oleh negara atau kelas dominan. Sebab media senantiasa berada dalam situasi dinamis, cair, dan prosesual. Dalam situasi historis tertentu media dapat mereproduksi artikulasi ideologis negara, namun dalam situasi lain media dapat menciptakan strategi-strategi resistensi.

Kata Kunci : Teori Strukturisasi, Media, Negara, dan Masyarakat

**ABSTRACT.** This article aims to explain media, state, and society relation in structuration theory of Anthony Giddens. The data were collected from library research. Structuration theory shows that media, state, and society relation is a social practice, not determined by the state or the dominant class because media is always exist in dynamic, liquid, and situation. In certain, historical situation, media can reproduce state ideologies articulation, but in other situation it can make resistance strategies.

Key Words: Structuration Theory, Media, State, and Society

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini agak sulit mengidentifikasi perubahan-perubahan yang pesat di masyarakat tanpa melibatkan dua entitas penting yang merupakan ciri masyarakat modern, yaitu media dan negara. Di satu sisi, negara dipersepsi sebagai kekuatan pemaksa yang efektif dan meresap masuk dalam sendi-sendi vital kehidupan masyarakat, namun di sisi lain, negara dilihat dalam wajahnya yang "netral" karena formasi negara sesungguhnya sangat bergantung pada kekuatan-kekuatan riil dalam masyarakat sendiri.

Demikian juga dengan media, di satu sisi dipersepsi sebagai pembentuk kesadaran masyarakat, namun di sisi lain diyakini bahwa kekuatan-kekuatan dalam masyarakat merupakan penentu proses komunikasi massa. Posisi media dan negara yang polemik tersebut tentu saja membutuhkan usaha konseptualisasi yang lebih memadai. Posisi media, apakah merupakan bagian dari masyarakat ataukah bagian dari negara juga menyimpan banyak pertanyaan. Teoritisi liberal meyakini bahwa media merupakan relasi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teoritisi marxis saling silang di antara mereka. Teoritikus

tertentu menempatkannya sebagai bagian dari negara (Althusser: *ideological state apparatuses*), teoritikus lain melihatnya sebagai bagian dari masyarakat sipil (Antonio Gramsci).

Dengan demikian, menemukan konseptualisasi yang memadai dengan memanfaatkan sumber-sumber alternatif terasa penting untuk dilakukan. Artikel ini berusaha untuk memanfaatkan asumsi-asumsi teoritik yang dikemukakan oleh teoritikus kontemporer, Anthony Giddens<sup>1</sup>. Fokus tulisan ini adalah: Bagaimanakah asumsi dasar teori strukturasi dari Anthony Giddens dapat digunakan untuk memahami relasi media, negara, dan masyarakat ?

### TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan diarahkan untuk memahami bagaimana konsepsi-konsepsi yang berkembang perihal relasi negara dan masyarakat. Dalam memahami hubungan negara dan masyarakat, kita senantiasa merujuk pada dua pandangan *mainstream*, yaitu pandangan yang berpusat pada negara (*state centered*), dan pandangan yang berpusat pada masyarakat (*society centered*). Pandangan yang pertama diwakili oleh konsep negara organis, sedangkan pandangan yang kedua diwakili oleh pluralis dan marxis.

Dalam konsep *negara organis*, negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri. Dia bukan sekedar alat dari keinginan sekelompok orang di masyarakat, atau gabungan dari keinginan-keinginan kelompok di masyarakat. Artinya, negara memiliki misinya sendiri, yang menciptakan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar ini, negara bukan lagi merupakan lembaga yang pasif, menjadi alat kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, namun negara secara aktif mencampuri urusan masyarakat, untuk membentuk masyarakat yang lebih baik (Budiman, 1997:17-20)

Menurut Alfred Stepan (Budiman, 1997: *Ibid*), konsep kebaikan umum, dengan keharusan moral yang dibebankan kepada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan mengambil prakarsa sendiri untuk memaksakan perubahan-perubahan besar kepada sebuah masyarakat yang sudah mapan, supaya dapat diciptakan sebuah masyarakat baru yang lebih baik.

Bentuk ekstrem dari negara organis adalah negara fasis. Kata 'fasis' sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti "seikat". Kata fasisme dimaksudkan untuk sebuah ikatan yang kuat, ikatan yang erat, persatuan yang kokoh dari sebuah bangsa, dengan negara sebagai pimpinannya. Negara menjadi badan dan roh

---

<sup>1</sup> Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah *library research*. Prosedur pelaksanaan adalah (1) melakukan inventarisasi kepustakaan yang berkaitan dengan media massa, negara, dan masyarakat (2) mengidentifikasi aspek-aspek relasi media, negara, dan masyarakat (3) menguraikan teori strukturasi dari Anthony Giddens, (4) mengkonseptualisasi dan menguraikan relasi media, negara, dan masyarakat dalam pandangan Anthony Giddens, dan membandingkannya dengan tradisi teoritik lain (5) memformulasi kesimpulan.

bangsa tersebut. Negara menentukan dan menjadikan bangsa tersebut besar dan mulia. (Budiman, 1997: *Ibid*)

Negara fasis adalah sebuah negara totaliter, bukan sekedar otoriter. Artinya tidak diperkenankan adanya pluralisme, tidak diperkenankan adanya organisasi apapun tumbuh, kecuali organisasi bentukan negara. Tidak boleh ada nilai lain yang berkembang, kecuali nilai yang diperkenankan negara. Semua orang harus menyerahkan diri pada negara, karena negara-lah yang tahu apa yang baik bagi bangsa itu. Dan negara adalah penggerak utama untuk merealisasikan kebaikan ini.<sup>2</sup>

Selanjutnya terdapat dua varian yang berkaitan dengan negara yang berpusat pada masyarakat (*society centered*), yaitu konsep *pluralis* dan *marxis*. Secara ringkas perbedaannya adalah bahwa pandangan pluralis melihat bahwa negara ditentukan oleh golongan-golongan dalam masyarakat, sedangkan pandangan marxis melihat bahwa negara merupakan alat dari kelompok dominan dalam masyarakat.

Pandangan pluralis melihat bahwa negara bagaikan sebuah 'arena', tempat berbagai golongan dalam masyarakat bertarung. Golongan-golongan sosial, sering disebut "golongan kepentingan" (*interest group*), membawa kepentingan mereka masing-masing ke dalam negara, lalu satu persatu memajukan kepentingannya untuk disetujui dijadikan sebuah kebijakan yang mengikat orang banyak dan menguntungkan golongannya. Pertarungan di antara mereka adalah pertarungan yang sah, dan mereka boleh memakai semua taktik dan strategi untuk memenangkan kepentingannya. Artinya, negara dipandang sebagai wilayah netral. Penguasaan atas kebijakan tertentu adalah hasil dari tarik-menarik di antara sejumlah kepentingan<sup>3</sup>.

Sedangkan pandangan marxis, dengan merujuk pada Karl Marx, terdapat dua teori yang dihasilkannya, dan keduanya bertentangan. Teori pertama, melihat bahwa negara merupakan bentuk atau serangkaian institusi yang dipakai oleh kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Di sini, negara adalah "komite eksekutif" kelas borjuis. Negara adalah cerminan dari kekuasaan kelas. Atau, negara itu "tidak lebih daripada bentuk organisasi yang diambilalih oleh kaum borjuis untuk maksud-maksud internal maupun eksternal. Teori kedua<sup>4</sup>,

---

<sup>2</sup> Negara fasis muncul di Italy dan Jerman, pada masa Benito Mussolini dan Adolf Hitler. Lihat Arif Budiman, 1997: *Ibid*

<sup>3</sup> Para pengikut kelompok pluralis memang berpandangan bahwa negara itu hanya ada sejauh masyarakat ada. Persis sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes maupun John Locke, yang berpendapat bahwa masyarakat ada "mendahului" negara. Bukan negara yang menciptakan masyarakat, melainkan masyarakat-lah yang menciptakan negara. Negara adalah hasil dari "kontrak sosial" anggota masyarakat, kata Rousseau. Lihat penjelasan perihal teori politik klasik dalam Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar dan Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988

<sup>4</sup> Sedangkan teori yang kedua ini merupakan hasil refleksinya terhadap Prancis di bawah Napoleon Bonaparte, yang menurutnya tidak hanya memiliki kekuasaan eksploitatif tetapi juga punya kekuasaan

melihat negara tidak terkait secara niscaya dengan kepentingan kelas dominan. Negara dilukiskan memiliki otonomi relatif. Artinya, dalam pandangan Marx, pada teori pertama, negara merupakan alat penindasan yang digunakan oleh kaum borjuis, sedangkan teori kedua, negara tidak bisa selalu dipakai oleh kaum borjuis. Negara memiliki otonomi relatif<sup>5</sup>. Kedua teori inilah yang lazim digunakan dalam menganalisis hubungan negara dan masyarakat. Namun apakah hubungan negara dan masyarakat beroperasi dalam ciri yang mekanistik seperti itu? Apakah negara selalu berada di seberang masyarakat? Untuk memahami kompleksitas hubungan negara dan masyarakat, teori strukturasi kiranya lebih mampu membuka segi-segi yang dilupakan oleh ancangan organik, pluralis dan Marxis.

## PEMBAHASAN

### Sekilas tentang Anthony Giddens

Anthony Giddens adalah seorang ilmuwan sosial kelas dunia yang menjadi dosen tetap sosiologi di *Universitas of Cambridge*. Di Cambridge, ia mengembangkan *Polity Press*, lembaga penerbitan akademik yang mampu memproduksi 80-an buku setiap tahunnya. Giddens juga menjadi dosen tamu luar biasa dan kehormatan di belasan perguruan tinggi besar di lima benua. Terakhir, sejak 1997, untuk masa jabatan lima tahun kedepan, Giddens diangkat menjadi direktur di almaternya, *London School of Economics*, dengan serangkaian pujian dari kolega dan seniornya untuk kepantasannya memegang jabatan tersebut. Ia dianggap memenuhi berbagai kriteria akademik: seorang ilmuwan sosial kelas dunia, administratur yang berhasil, seorang pengusaha dan seorang dengan kemampuan politik dan interpersonal.

Sebagai seorang ilmuwan, Giddens tidak sekedar melahirkan karya-karya tulis yang bermutu bila diukur secara kualitatif, tapi ia juga seorang pemikir yang produktif secara kuantitatif. Lebih dari 200-an judul artikel yang ditulisnya tersebar di jurnal-jurnal profesional, mingguan dan surat kabar. Tidak kurang dari 57 judul buku yang telah ditulis Giddens sendiri atau bekerjasama dengan

---

politik yang independen. Buku yang dihasilkan dari hasil analisis ini adalah *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1852). Negara yang seperti ini oleh Marx dinamakan Negara Bonapartis.

<sup>5</sup> Terdapat alasan yang dikemukakan oleh analisis mengapa Marx punya dua teori yang saling bertentangan ini, yaitu barangkali Marx memaksudkan otonomi itu untuk jangka waktu tertentu atau sementara, sedangkan dalam jangka panjang, negara tetap menjadi alat penindasan oleh kaum borjuis. Lihat I. Wibowo, *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Rakyat Cina*, Gramedia, Jakarta, 2000: 13-14. Artinya sekalipun dalam jangka pendek negara memiliki otonomi relatif terhadap kelas kapitalis, namun dalam jangka panjang bertujuan untuk melanggengkan sistem kapitalisme. Ini karena sekalipun otonom terhadap kelas kapitalis, tapi negara memiliki keterbatasan struktural terhadap sistem kapitalisme. Dengan kata lain, negara menjadi subordinat atau instrumen dari sistem kapitalisme. Yang dilayani bukan lagi kelas atau individu-individu tapi sistem kapitalisme global. Lihat Arif Budiman, "Negara: Kesadaran, Kemauan, dan Keterbatasan Strukturalnya", dalam *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990: 35

pengarang lain, meliputi bidang sosiologi, politik, dan teori sosial yang diminatinya.

Di antara buku-buku karya Giddens yang paling berpengaruh dapat disebutkan di sini: *Capitalism and Modern Social Theory* (1971), *New Rules of Sociological Method* (1976), *Central Problems in Social Theory* (1979), *The Constitution of Society* (1984), *Modernity and Self Identity* (1991) dan *In Defence of Sociology* (1998). Di samping itu dua bukunya yang terbit belakangan: *The Third Way* (1998) dan *Runaway World* (1999) yang lebih praktis dan terkenal di Indonesia.

Giddens adalah seorang teoritikus sosial yang membangun teorinya secara eklektik. Ia mengkritik banyak teori sosial yang menjadi warisan "tradisi ortodoks" sekaligus menggunakan bagian-bagiannya sebagai titik tolak kritis untuk membangun teorinya sendiri. Teori strukturasi dibangun dalam proses panjang kritik dan sintesis. Giddens memusatkan perhatiannya pada upaya untuk merekonstruksi secara radikal teori sosial, karena teori yang ada tidak memadai lagi untuk memahami kondisi masyarakat modern dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Ia mengkritik teori sosial klasik, mengambil hal-hal yang berguna untuk membangun teori baru dan membuang yang dianggapnya tidak relevan. Namun, Giddens juga membawa perubahan pada ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, dan ekonomi (Craib, 1992:2)

Di samping merevisi pemahaman terhadap sosiologi yang semula mengikuti model ilmu alam, Giddens juga memperbaharui pendekatan dalam membahas persoalan 'struktur' dan 'tindakan'. Giddens memahami hal yang semula dianggap dualisme tersebut dengan menggunakan pendekatan dualitas, keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Pemikiran Giddens bisa dianggap merupakan jalan tengah dari cara pendekatan lama dalam teori sosial, sebagaimana Giddens juga menawarkan jalan tengah dalam kehidupan sosial modern pada bukunya *The Third Way* (1998)

Selain itu, dalam teori Strukturasi, Giddens juga menggambarkan corak pemikiran yang cenderung ontologis dibanding epistemologis. Giddens mengkritisi kecenderungan sosiologi yang terlalu menaruh perhatian pada usaha menghasilkan pengetahuan yang ilmiah, atau dengan kata lain mempersoalkan kedudukan ilmiah sosiologi di antara ilmu-ilmu alam, dibanding melihat persoalan dalam dunia sosial dan memutuskan apa yang harus menjadi bahasan sosiologi (Craib, 1992, *Ibid*)

Corak eklektik yang digunakan Giddens dalam merumuskan pemikirannya tentang teori sosial membuatnya banyak mendapat pengaruh dari berbagai pemikiran sosial yang ada. Seperti yang diungkapkannya dalam *New Rules of Sociological Method* (1976) (Suarni & Sastrapratedja, 2002:244):

[...] *I discuss several schools of thought in social theory and social philosophy, from the phenomenology of Schultz to recent development in hermeneutics philosophy and critical theory; I shall try to make it*

*clear what, if anything, I have borrowed from each of these school, and shall attempt to indicate some of their shortcomings*

Paling tidak terdapat sembilan pokok pemikiran yang mempengaruhi Giddens: filsafat bahasa post-Wittgenstein, sosiologi fenomenologis dan etnometodologi, pendekatan dramaturgi, psikoanalisa Erik Erikson, hermeneutika, strukturalisme dan post-strukturalisme Marxisme, Heidegger, dan konsep tentang ruang waktu (Craib, *opcit*:19).

### **Teori Strukturasi Giddens**

Sebelumnya telah disinggung perihal kata kunci dalam teori strukturasi: "struktur" dan "agensi"<sup>6</sup>. Menurut Anthony Giddens<sup>7</sup> yang dimaksud dengan "struktur" adalah "*rules and resources*" yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem. Sedangkan "agensi" (terjemahan harfiah Inggris: *agency*) adalah individu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi lewat intervensi individu.

Giddens dipandang sebagai orang pertama yang berhasil menghasilkan teori yang menghubungkan struktur dan agensi. Teorinya disebut "Teori Strukturasi"<sup>8</sup>. Dalam teori ini, struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan muncul *dualisme* struktur-agensi. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas (*duality*), dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus menerus, tanpa henti. Teori Giddens tentang strukturasi didasarkan pada premis bahwa (Giddens,1984 dalam Hidayat, 2000:440):

*"[...] the constitution of agents and structures are not two independently given sets of phenomena, a dualism, but represent a duality...the structural properties of social systems are both medium*

<sup>6</sup> Persoalan "struktur" dan "agensi" sebenarnya persoalan yang telah menghantui banyak sosiolog. Pada umumnya mereka akan terjerumus ke dalam "strukturalisme" (termasuk di dalamnya fungsionalisme) atau ke dalam "intentionalisme". Dua ancangan yang telah disebutkan di atas mengalami keterjerumusan. Marxisme terjerumus dalam "strukturalisme", dan pluralisme terjebak dalam "intensionalisme". Hubungan antara struktur dan agensi dipandang secara berat sebelah, jika bukan struktur maka yang ditekankan adalah agensi. Dengan demikian konsepsi yang berkembang adalah agensi menjadi korban struktur (strukturalisme), atau struktur mengalami "imperialisme subyek" (intentionalisme). Lihat Wibowo, *Ibid*: 20

<sup>7</sup> Penjelasan panjang lebar tentang pandangan-pandangan Giddens perihal negara dan masyarakat dalam tulisan ini, sebagian besar bersumber dari I. Wibowo, *Op cit*: 20-28; B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002; Ian Craib, 1992; dan Raisah Suarni & M. Sastrapratedja SJ, 2002

<sup>8</sup> Selain Giddens, Pierre Bourdieu juga melihat bahwa pandangan yang memisahkan agen dan struktur adalah semu. Kontradiksi antara keduanya semu, karena keduanya tidak terpisah dalam praktik sosial. Lewat konsepsi yang hampir mirip, Bourdieu menamakan 'struktur mental' untuk apa yang disebut Giddens sebagai 'skemata', dan menyebut 'habitus' untuk apa yang disebut Giddens sebagai 'kesadaran praktis'. Lihat B. Herry-Priyono, *Ibid*: 86

*and outcome of the practices they recursively organize...the moment of the production of action is also one of reproduction in the contexts of the day-to-day enactment of social life"*

Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti: memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*)<sup>9</sup>. Terjadinya paradoks dalam pengertian struktur ini karena Giddens melihat struktur merupakan hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Dan bukanlah merupakan totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti yang dipahami para fungsionalis. Dalam pengertian Giddens, agensi dapat meninggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Situasi ini disebut *dialectic of control*. Agensi dapat melawan struktur yang berupa kontrol: "*The more tightly-knit and inflexible the formal relations of authority within an organization, in fact, the more the possible openings for circumventing them*"

Maka dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut "*social practices*"<sup>10</sup>. Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detail struktur dan agensi. Namun fokus utama harus diletakkan pada *social practice*, yaitu bagaimana manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anak-istri/suami, sahabat, maupun dengan birokrat, pelayan bank, dan lain-lain.

Kata *production* dan *reproduction* barangkali harus diuraikan secara eksplisit. Masyarakat manusia tidak sekali jadi dan diteruskan begitu saja sebagaimana diandaikan oleh teori-teori yang menganut strukturalisme/fungsionalisme. Dari sudut teori strukturasi, masyarakat manusia itu diproduksi dan terus menerus direproduksi setiap hari dalam ruang dan waktu.

---

<sup>9</sup> Giddens mengambil bahasa sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah, baik kosa kata maupun tata bahasanya. Keduanya adalah struktur (*rules*) yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai kosa kata dan tata bahasa, orang mampu untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya tanpa batas. Dalam hal ini, struktur justru memampukan agensi. Seandainya ia tidak pernah mempelajari kosa kata dan tata bahasanya, ia akan tetap membisu. Pengertian struktur disini, sama sekali berbeda dengan yang dikemukakan oleh Levi-Strauss. Bahkan dalam pengertian Giddens, struktur sekaligus juga *medium*. Giddens mengkritik analisis sosial yang semata-mata mengutamakan struktur, sebagaimana yang lazim dalam pemikiran structuralisme (de Saussure dan Levi-Straus) dan fungsionalisme (Parson), ataupun pemikiran sosial yang semata-mata mengutamakan agensi atau tindakan sosial individu sebagaimana lazim dalam pemikiran interaksionisme simbolik (Mead, Blumer, Goffman, dll). Menurutnya bukanlah dualisme antara struktur dan agensi, tetapi timbal balik antara keduanya (dualitas).

<sup>10</sup> Menurut Giddens "*The basic domain of study of the social science, according to the theory of structuration, is neither the experience of the individual actors nor the existence of any form of societal totality, but social practice ordered across space and time*". Lihat Wibowo, *Opcit*: 21

Dalam proses ini, agensi tidak boleh dibayangkan sebagai manusia yang tolol, yang pasrah menerima nasib, melainkan sebagai manusia yang tahu dan paham akan liku-liku kehidupan. Semua tingkah lakunya selalu dimonitor agar cocok dengan norma dan kaidah. Tetapi tidak semua tingkah laku tersebut selalu harus disadari sepenuhnya.

Giddens membedakan 3 (tiga) dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) (Priyono, 2002 :28-31). Motivasi tak sadar (*unconscious motives*) menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Diilustrasikan misalnya sangat jarang 'tindakan' kita pergi ke tempat kerja digerakkan oleh motif mencari uang, kecuali mungkin pada hari gajian. Begitu pula sangat jarang pegawai negeri memakai seragam KORPRI karena digerakkan oleh motivasi memperkuat korporatisme Orde Baru. Berbeda dengan motivasi tak sadar, kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Dengan kata lain terdapat sejumlah alasan bagi semua tindakan kita. Sedangkan kesadaran praktis (*practical consciousness*) menunjuk pada gugus pengetahuan yang tidak selalu bisa diurai. Tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus PNS memakai pakaian KORPRI, atau tidak berisik bila sedang di tempat ibadah. Ini merupakan kesadaran praktis. Dalam fenomenologi, inilah wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*). Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan ini merupakan sumber "rasa aman ontologis" (*ontological security*). Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus terus menerus mempertanyakan apa yang terjadi atau yang mesti dilakukan. Kita tidak harus bertanya mengapa menyalakan kompor ketika hendak memasak. Demikian pula kita hampir tidak pernah bertanya mengapa kita menghentikan kendaraan ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Rutinisasi hidup personal dan sosial terbentuk melalui kinerja gugus kesadaran praktis ini (Priyono, *ibid*)

Sejalan dengan tesis Berger yaitu *eksternalisasi*, kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita (dalam bahasa Berger: *pencurahan diri*) lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang atau memampukan tindakan atau praktik sosial (Berger menyebutnya *internalisasi*)<sup>11</sup>. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan oleh

---

<sup>11</sup> Gagasan Giddens sesungguhnya mirip dengan pemikiran Berger. Menurut Berger terjadi proses dialektis antara struktur dan individu. Proses tersebut terjadi dalam tiga momen yaitu objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Giddens menyebut proses dialektis ini sebagai hubungan timbal balik yang terjadi dalam praktik sosial antara struktur dan *agency*, atau dualitas (*duality*). Uraian tentang dialektika dalam pembentukan realitas yang melibatkan modus objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi, lihat Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, 1990; dan Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1994

## **Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif (Abdul Firman Ashaf)**

---

aktor pelaku. Tapi apakah yang terjadi hanyalah reproduksi sosial dan tanpa perubahan?

Dalam refleksi Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, betapapun kecilnya perubahan itu. Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah tipis, tidak seperti jarak antara kesadaran diskursif dengan motivasi tak sadar yang sedemikian jauh. Dengan meminjam gagasan interaksionisme simbolik Goffman, Giddens mengajukan argumen bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*). Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung 'de-rutinisasi'. Derutinisasi menyangkut gejala bahwa skemata yang selama ini menjadi aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) tindakan serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial yang baru.

Apa yang kemudian terjadi adalah keusangan (*obsolescence, obsolescence*) struktur. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru<sup>12</sup>.

### **Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Usaha Konseptualisasi Alternatif**

Lalu bagaimana menjelaskan hubungan negara dan masyarakat, dan juga media, dan bagaimana pada akhirnya kita sampai pada penerapan konsepsi Giddens ?. Berikut ini ada empat konseptualisasi yang bisa diajukan, yaitu<sup>13</sup>:

*Pertama:* media bisa dilihat sebagai – sekedar – mediasi dari berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang beinteraksi. Dalam hal ini media merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara negara dan kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat. Pandangan ini mengecilkan kemampuan negara mengembangkan kepentingannya sendiri, sehingga senantiasa hanya dianggap sebagai representasi pergulatan kepentingan dalam masyarakat. Konseptualisasi ini lebih tepat untuk menamai dinamika relasi media, negara dan masyarakat dalam masyarakat dan sistem politik yang liberal. Hal ini karena tidak ada kekuatan yang determinan yang dapat mempengaruhi media. Produk media hanyalah rekaman atas pola relasi dinamis antara negara dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Ketidakpuasan yang berujung pada runtuhnya bangunan politik dan ekonomi Orde Baru menunjukkan bahwa bangunan tersebut telah tidak mampu lagi menjadi mediasi praktik-praktik sosial-politik dari para agen pelaku.

<sup>13</sup> Usaha untuk mengkonseptualisasi relasi media dan negara ini, penulis sangat terbantu oleh usaha konseptualisasi yang dibuat Abar dan Mc Quail. Dua yang pertama, merujuk pada sumber-sumber ini. Lihat Ahmad Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia: 1966-1974*, LKiS, Yogyakarta, 1995: 36-37, dan Denis Mc Quail, *Op cit*: 85, terutama berkaitan dengan asumsi mereka perihal teori negara organis, pluralis, dan marxis.

*Kedua:* media dilihat sebagai salah satu bagian dari kekuatan sosial-politik dari berbagai kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat, media menempatkan dirinya sebagai kekuatan sosial politik (non negara) yang berhadapan dengan kekuatan politik negara. Konseptualisasi ini juga lebih tepat dalam konteks sistem sosial politik liberal. Ini berarti media dimiliki secara ekonomis dan politis oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Namun demikian, pandangan ini mengabaikan relasi antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat dengan elemen-elemen negara, karena itu penting untuk melihat konseptualisasi selanjutnya.

*Ketiga:* Media merupakan bagian dari proyek kepentingan kelas dominan. Dalam hal ini media dimiliki oleh masyarakat, namun pemiliknya merupakan representasi kelompok dominan dalam masyarakat. Posisi negara dalam konsepsi ini adalah mengikuti argumentasi strukturalisme marxis, melayani kepentingan kelompok dominan tersebut. Seringkali negara, bahkan merupakan bagian dari kelompok dominan. Alhasil, kelompok dominan merupakan kelompok yang diuntungkan oleh negara. Negara justru menjaga kelangsungan eksistensinya dengan mereproduksi terus-menerus kelangsungan hidup kelompok dominan. Namun demikian, disisi lain sesungguhnya media tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh kelompok dominan dalam masyarakat, sebagaimana konseptualisasi selanjutnya.

*Keempat:* Dengan pengandaian bahwa negara juga bisa memiliki kemandirian, maka media bisa dilihat merupakan bagian dari instrumen negara. Dalam hal ini media bisa saja dimiliki oleh masyarakat, namun hubungan antara media dan negara bersifat regulatif dan sumber daya. Kuatnya kontrol negara pada sisi regulasi dan sumberdaya, membuat media lebih memperjuangkan kepentingan negara. Tetapi, perlu disimak bahwa negara bukanlah entitas yang monolitik, karena itu penting untuk memahami kontradiksi-kontradiksi tertentu dari negara, sekaligus melihat dinamika media itu sendiri. Kita akan sampai pandangan selanjutnya.

*Kelima:* media berada dalam konteks struktur tertentu, namun karena sesungguhnya struktur juga bersifat dinamis maka relasi antara media dan negara juga mengalami pasang surut. Dalam posisi ini, pada konteks historis tertentu media bisa merupakan medium artikulasi negara (hegemonik), namun pada konteks historis lain, media mampu mengembangkan strategi-strategi resistensi.

Ringkasnya, konsepsi yang pertama, kedua, dan ketiga mengikuti argumentasi *society centered*; konsepsi keempat mengikuti argumentasi *state-centered*; sedangkan konsepsi yang kelima sekaligus mewakili argumentasi *state and society centered*<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Konseptualisasi ini sekedar sebagai penamaan yang bertujuan untuk penyederhanaan dan pembedaan konseptual. Argumentasi di balik itu adalah bahwa dalam pandangan strukturalisme, struktur diasumsikan selain bersifat mengekang juga memberdayakan. Dengan demikian relasi negara dan

**Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif (Abdul Firman Ashaf)**

Pola relasi negara, media dan masyarakat dalam konseptualisasi kelima (*state and society centered*) mengikuti argumentasi Giddens. Menurut Giddens, hubungan “negara” dan “masyarakat” adalah *social practice*. Terutama jika “negara” dipahami sebagai struktur dan “masyarakat” sebagai agensi. Salah satu elemen “masyarakat” adalah media<sup>15</sup>.

Figur 1: Model Hubungan Media, Masyarakat, dan Negara

DIMENSI	POLA RELASI			
	Pluralis	Marxis	Organis	Strukturasi
Hubungan Negara dan Masyarakat	<i>Society Centered</i> (berpusat pada kepentingan semua golongan)	<i>Society Centered</i> (berpusat pada kepentingan kelompok dominan)	<i>State Centered</i> (berpusat pada kepentingan negara)	<i>State &amp; Society Centered</i> (berpusat pada relasi dialektis negara dan masyarakat)
Sistem Pemilikan Media	Oleh setiap orang yang memiliki kemampuan idealisme, ekonomi, tanpa ada regulasi perizinan	Oleh sedikit orang yang memiliki akses politis untuk menembus regulasi perizinan, serta memiliki akses dan dominasi ekonomi	Oleh negara atau sedikit orang yang mendapat mandat dari negara	Oleh setiap orang yang memiliki kemampuan idealisme, ekonomi, tanpa ada regulasi perizinan
Isi dan Orientasi Media	Berorientasi kepada kelompok-kelompok sosial politik dalam masyarakat. Tipenya beragam	Cenderung mengarah pada kepentingan kelompok elit dominan. Tipenya seragam	Mengarah pada kepentingan negara. Tipenya seragam, terkontrol	Berorientasi pada kemampuan agen dalam relasinya dengan struktur pada situasi historis tertentu. Media juga memperjuangkan kepentingannya sendiri. Isi media tipenya beragam

masyarakat, di mana media berada, bersifat cair dan dinamis. Ia bisa memihak pada negara dalam situasi terhegemoni, namun bisa pula mengembangkan strategi resistensi terhadap negara. Media memihak kepada negara apabila media patuh dan tidak mengambil jarak terhadap struktur atau negara. Namun karena struktur juga bisa usang dan bisa dianggap tidak memadai lagi, maka media, lewat kesadaran diskursif mampu berbalik mengkoreksi struktur.

<sup>15</sup> Namun media sendiri sesungguhnya juga merupakan struktur, dan bahkan negara bisa dikatakan sebagai agensi. Terdapat pandangan yang melihat agen dan struktur dan lapisan-lapisan yang khas, dengan demikian *Agency* bisa merujuk pada tindakan sosial *human agents* dalam pengertian yang luas, tidak hanya individu, tetapi juga bisa kelompok terorganisir, organisasi, dan negara (misalnya: Burns, 1986). Kajian ini melihat agen sebagai tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh pelaku-pelaku sosial baik sebagai individu maupun kolektivitas (jurnalis, pemimpin redaksi, pemilik modal, pengiklan, khalayak, dll). Lihat Dedy N. Hidayat, *OpCit.* catatan kaki no. 1, hal 435

Untuk mengenali batas-batas bagi identifikasi dan kemanfaatan konsep-konsep Giddens secara lebih jelas, kita bisa mengajukan refleksi terhadap realitas relasi media, negara, dan masyarakat pada masa Orde Baru tahun 90-an. Untuk itu, kembali diajukan konsep *duality* sebagaimana yang dipahami Giddens. Namun, konsep *duality* oleh sementara pengamat dianggap kurang memadai untuk menerangkan realitas pers dan struktur ekonomi politik Orde Baru. Hal ini karena, konsep *duality* tidak memisahkan antara struktur dan agensi. Itu artinya, setiap perubahan dalam struktur akan mempengaruhi agensi, dan demikian pula sebaliknya. Segelintir pengamat lebih tertarik untuk menggunakan konsep *dualisme*, yang memahami agensi dan struktur bersifat otonom dan terpisah. Argumentasi ini didasari oleh studi ekonomi politik media yang multi struktur. Sebuah pengamatan yang holistik mengharuskan kita untuk mengamati beberapa struktur yang saling terpisah, sekalipun tidak bisa dikatakan tidak saling mempengaruhi, misalnya: struktur organisasi media, struktur industri media, struktur ekonomi-politik Orde Baru, dan struktur kapitalisme global (Hidayat, *Ibid.*: 431-447). Namun sebagaimana diisyaratkan juga, bahwa dalam konteks yang berbeda, kedua konsep ini bisa bermanfaat. Konteks tertentu mungkin sebaiknya menggunakan *dualisme*, namun untuk konteks yang lain, *duality* cukup memadai. Asumsi-asumsi tulisan ini tidak berpretensi untuk memeriksa bagaimana struktur ekonomi-politik yang lebih luas, baik struktur ekonomi politik Orde Baru ataupun struktur kapitalisme global, karena itu konsep *duality* yang diajukan Giddens sangat relevan untuk digunakan dengan beberapa alasan, yaitu sebagaimana diisyaratkan bahwa konsep ini cukup memadai apabila yang diamati pada lapis industri/organisasi media, yaitu struktur industri dan tindakan-tindakan agen pelaku (jurnalis, pemimpin redaksi dan pemilik media, pengiklan, dan khalayak) (Hidayat, *Ibid.*: 441). Hubungan antara struktur industri yang melibatkan pelaku-pelaku tersebut akan mempengaruhi formasi *content* pada level mikro. Dengan demikian, konseptualisasi ini selain mengkaji aspek mikro, yaitu *content* media, juga ingin melihat keterkaitannya dengan aspek meso sebagai reaksi atas struktur (atau makro) sosio-politik Indonesia yang mengalami perubahan-perubahan, dalam bahasa Anders Uhlin untuk konteks Indonesia tahun 90-an, fase pra transisi (Uhlin, 1998).

Tentu saja, saya tidak ingin berkesimpulan bahwa *content* serta-merta akan mempengaruhi struktur, namun sekedar sebagai reaksi dalam konteks praktik sosial terhadap dan dalam struktur. Namun, pandangan bahwa *content* media akan mempengaruhi struktur sesungguhnya juga memang beralasan, terutama dalam bagi struktur yang telah mengalami keusangan dan terus menerus mengalami delegitimasi karena tidak mampu lagi memberi ruang bagi praktik-praktik sosial yang berubah<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Lihat beberapa tulisan yang diedit oleh Dedy N. Hidayat et.al, *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Gramedia, Jakarta, 2000. Beberapa tulisan dalam buku ini menunjukkan terjadi proses delegitimasi terhadap rezim Orde Baru yang dilakukan oleh media-media di Indonesia menjelang runtuhnya rezim tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pemikiran Giddens merupakan wilayah teoritik yang kerap kali ditempatkan dalam bilik yang ambigu. Hal ini disebabkan yang dilakukan Giddens adalah sintesis rumit yang telah membatu dalam pandangan-pandangan dari dua kubu, yaitu struktural dan fenomenologi. Pemikiran Giddens yang sintetik berusaha menjembatani kedua kubu ini. Usaha ini sesungguhnya dilakukan oleh beberapa teoritis kontemporer, antara lain Peter L. Berger dan Piere Bourdieu.

Berbekal pemikiran Giddens inilah, berusaha dikonseptualisasi model relasi media, negara, dan masyarakat. Implikasinya, relasi tersebut sebagaimana pandangan Giddens dapat dilihat sebagai praktik sosial, ketimbang determinasi dari negara atau kelompok dominan. Karena merupakan praktik sosial, maka media senantiasa berada dalam situasi dinamis, cair dan prosesusual, yang dalam suatu konteks historis tertentu dapat mereproduksi artikulasi ideologis negara, namun dalam situasi lain bisa saja justru mengembangkan strategi resistensi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada *anonymous reviewers* atas masukan berupa saran dan kritik konstruktif demi perbaikan naskah awal tulisan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abar, Ahmad Zaini, *Kisah Pers Indonesia: 1966-1974*, LKIS, Yogyakarta, 1995
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Berger, Peter L., *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1994
- Budiman, Arif, "Negara: Kesadaran, Kemauan, dan Keterbatasan Strukturalnya", dalam *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Budiman, Arif, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Craib, Ian, *Anthony Giddens*, Routledge, London, 1992
- Hidayat, Dedy N., "Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial", dalam Dedy N. Hidayat, *et.al*, *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Hidayat, Dedy N. *et.al*, *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar dan Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988
- Mc Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1991

Priyono, B. Herry, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002

Suarni, Raisah & M. Sastrapratedja S.J., "Teori Strukturasi: Telaah Kritis terhadap Pemikiran Anthony Giddens", *Sosiohumanika* (Berkala Penelitian Pascasarjana Universitas Gadjah Mada), No. 15 (1), Januari 2002

Uhlin, Anders, *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998

Wibowo, I., *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Rakyat Cina*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000